



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

PERJANJIAN KINERJA

TA . 2025

- Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
- Biro Hukum dan Organisasi
- Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
- Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
- Inspektorat

ESELON II



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evita Manthovani

Jabatan : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Susiwijono

Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Susiwijono

Pihak Pertama,

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan
Kerja Sama

Evita Manthovani

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	1.1	Nilai AKIP	75
		1.2	Indeks Kualitas Kebijakan	99%
		1.3	Indeks SPBE	4,2
		1.4	Indeks Perencanaan	97%
		1.5	Capaian Prioritas Nasional	100%
		1.6	Capaian Indikator Kinerja Utama	100%
		1.7	Nilai Kinerja Anggaran	>90 (Sangat Baik)
2.	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	2.1	Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular	70%
		2.2	Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan	70%
3.	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti	90%
4.	Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerjasama yang berkualitas	4.1	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja	100%
		4.2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	100%
		4.3	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja	100%
		4.4	Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan	100%
		4.5	Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi	100%
5.	Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	3 dari 4
6.	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	85%
		6.2	Nilai AKIP Sekretariat	82

Kegiatan

1. Layanan Kegiatan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Total

(Enam Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Anggaran

Rp. 16.594.188.000,-

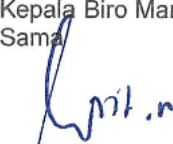
Rp. 16.594.188.000,-

Pihak kedua,
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Susi Wijono

Pihak Pertama,
Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama



Evita Manthovani



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Ktut Hadi Priatna

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Susiwijono

Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Susiwijono

Pihak Pertama,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

I Ktut Hadi Priatna

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Hukum dan Organisasi	1.1	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%
		1.2	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100%
		1.3	Tingkat Capaian Sistem Kerja	5
		1.4	Indeks Reformasi Hukum	90
2.	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif	2.1	Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja	95%
3.	Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas	3.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Koordinasi Perumusan Produk Hukum	95%
		3.2	Persentase Penyelesaian Dokumen Advokasi Hukum	95%
		3.3	Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi	100%
		3.4	Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Sistem Kerja	100%
		3.5	Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi Tematik	100%
		3.6	Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi General	100%
4.	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas	4.1	Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3 dari 4
5.	Terwujudnya Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	5.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi	100%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Total

(Sepuluh Milyar Rupiah)

Anggaran

Rp. 4.000.000.000,-
Rp. 6.000.000.000,-

Rp. 10.000.000.000,-

Pihak kedua,
Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian



Susi Wijono

Pihak Pertama,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



I Ketut Hadi Priatna



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI, DAN PERSIDANGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haryo Limanseto

Jabatan : Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Susiwijono

Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Susiwijono

Pihak Pertama,

Plt. Kepala Biro Komunikasi Layanan
Informasi dan Persidangan

Haryo Limanseto

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI, DAN PERSIDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan	1.1	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian di Media Massa	>70%
		1.2	Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Tepat Waktu	90%
2.	Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif	2.1	Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan Tepat Waktu	90%
		2.2	Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan	12 Dokumen
		2.3	Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu	90%
3.	Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tata Kelola Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan yang Baik	4.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan	85%

Kegiatan

1. Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi
2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
3. Layanan Kegiatan Persidangan
4. Layanan Penyiapan Naskah Kebijakan Menteri

Anggaran

Rp. 6.500.000.000,-
Rp. 2.500.000.000,-
Rp. 500.000.000,-
Rp. 500.000.000,-

Total

(Sepuluh Milyar Rupiah)

Rp. 10.000.000.000,-

Pihak kedua,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian



Susi Wijono

Pihak Pertama,

Plt. Biro Komunikasi, Layanan Informasi,
dan Persidangan



Haryo Limanseto



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hari Nugroho

Jabatan : Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Susiwijono

Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,

Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Susiwijono

Pihak Pertama,

Kepala Biro Umum dan Sumber Daya
Manusia

Hari Nugroho

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	1.1	Indeks Penyelenggaraan Arsip	90
		1.2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Baik
		1.3	Indeks Pengelolaan Aset	3,6
		1.4	Indeks NSPK Manajemen ASN	Baik
		1.5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	85
2.	Terwujudnya Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kearsipan, dan Pengelolaan Barang/Jasa Bidang Perekonomian yang Efektif	2.1	Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu	95%
		2.2	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan	3 dari 5
		2.3	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik	90%
		2.4	Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu	90%
		2.5	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan	23,6%
		2.6	Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	21,4%
3.	Terwujudnya layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dalam dukungan manajemen yang berkualitas	3.1	Indeks kepuasan layanan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	3 dari 4
4.	Terwujudnya Tata Kelola di Unit Umum dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	85%

Kegiatan

1. Layanan Protokoler
2. Layanan Umum
3. Layanan Perkantoran
4. Layanan Sarana Internal
5. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Layanan Manajemen Keuangan

Total

(Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Anggaran

Rp. 1.900.000.000,-
 Rp. 2.000.000.000,-
 Rp. 212.128.024.000,-
 Rp. 4.400.000.000,-
 Rp. 4.500.000.000,-
 Rp. 600.000.000,-

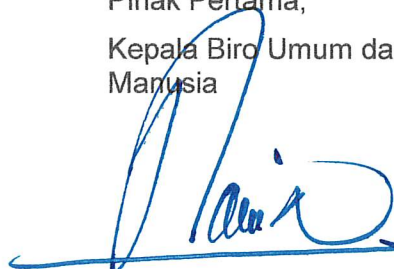
Rp. 225.528.024.000,-

Pihak kedua,
 Sekretaris Kementerian Koordinator
 Bidang Perekonomian



Susi Wijono

Pihak Pertama,
 Kepala Biro Umum dan Sumber Daya
 Manusia



Hari Nugroho



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mirza Sofjanhadi Mashudi

Jabatan : Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak kedua,

Menteri Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Inspektur Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Mirza Sofjanhadi Mashudi

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai	1.1	Tingkat Maturitas SPIP	3,58
		1.2	Tindak lanjut Rekomendasi BPK	75%
		1.3	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,50
		1.4	Opini BPK	WTP
		1.5	Survey Penilaian Integritas (SPI)	82
		1.6	Tingkat Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3
		1.7	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27
2.	Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang <i>Agile</i>	2.1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	80%
		2.2	Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti	80%
3.	Terwujudnya Transformasi APIP Sebagai <i>Trusted Advisor</i> dan <i>Strategic Partner</i>	3.1	Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat	3 dari 4
		3.2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi	90%
4.	Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik	4.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	85%

Kegiatan

1. Layanan Kegiatan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Total

(Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Anggaran

Rp. 1.150.000.000,-

Rp. 1.150.000.000,-

Pihak kedua,

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Inspektur Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian



Mirza Sofjanhadi Mashudi